



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Soekarno Hatta No.84 Telp.82565 Padang Panjang 27116

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 90 / 7a / PUPR-PP / I - 2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2019**

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 900 / 74 / PUPR-PP/I-2019
Tanggal : 14 Januari 2019

9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018


KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja tahunan, dan rencana kinerjaanggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang Panjang;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang.
pada tanggal 14 Januari 2019

**A.n. WALIKOTA PADANG PANJANG,
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PADANG PANJANG**


YAS EDIZARWIN, SH
NIP. 19630727 199203 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang,
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang,
3. Arsip.

IKU DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KET/ KRIT ERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya infrastruktur dasar publik yang sesuai standar	1. Persentase sarana infrastruktur dasar publik dalam kondisi baik	%	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya kualitas dan kapasitas jalan - Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang jalan - Belum terpenuhinya debit air untuk kebutuhan irigasi - Belum terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air untuk mendukung keberlanjutan penyediaan air dan pengendalian daya rusak air - Belum tersedianya lahan pembanguan jalan,kantor dan RTH - Masih ada tanah milik pemerintah yang belum bersefifikat - Belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan jaringan irigasi dan sungai di kota padang panjang - Belum maksimalnya layanan jalan dan sarana pendukung jalan seperti trotoar dan drainase - Belum teriyani secara maksimal akses penerangan jalan umum di wilayah kota padang panjang - Memenuhi Target Standar Pelayanan Minimal - Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur kota - Memenuhi Target Standar Pelayanan Minimal 	Rata-rata pemb jalan,irigasi,drainase,trotoar, bangunan gedung RTH sarana sanitasi,PJU yang dibangun; atau direhab / Rata-rata jalan,irigasi,drainase,trotoar, bangunan gedung,RTH,sarana sanitasi.PJU yang direncanakan x 100%	Dinas PUPR Kota Padang Panjang	
		2. Persentase rumah tinggal dengan bersanitasi layak	%	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur kota - Memenuhi Target Standar Pelayanan Minimal 	Jumlah rumah tangga dikota padang panjang / jumlah rumah yang punya sanitasi yang layak x 100%	Dinas PUPR Kota Padang Panjang	

		3. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	%	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terpenuhinya target pelayanan air minum untuk seluruh masyarakat - Memenuhi Target Standar Pelayanan Minimal 	Total jumlah rumah di kota Padang panjang / jumlah yang mempunyai air minum x 100%	Dinas PUPR Kota Padang Panjang
2.	Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang	Indeks penilaian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan tata ruang	%	<ul style="list-style-type: none"> - Belum terintegritasnya penataan ruang dan pertahanan dalam proses penyusunan dokumen rencana tata ruang - Belum tersedianya lahan pembangunan jalan, kantor dan RTH - Masih ada tanah milik pemerintah yang belum berseftrifikat - Masih rendahnya kepastian hukum asset tanah dari persentase luas lahan bersertifikat dan penyelesaian konflik-konflik pertanahan - Memenuhi Target Standar Pelayanan Minimal 	Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan tata ruang (Na)	Dinas PUPR Kota Padang Panjang

Padang Panjang, 26 Juni 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

